

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilansir oleh BBC, FSA (*Financial Services Authority*) pada tahun 2004 secara mengejutkan melegalkan operasional IBB (*Islamic Bank of Britain*) yang merupakan bank swasta Islam pertama di UK dengan modal awal dari beberapa investor Timur Tengah dan muslim United Kingdom¹. Dalam prosesnya IBB mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan memicu perkembangan kehadiran perusahaan – perusahaan sejenis.

Hingga saat ini United Kingdom diklaim sebagai Negara Barat paling maju terkait pemberdayaan Perbankan Islam dan tercatat mempunyai 5 Bank yang menerapkan Syariah secara penuh, disamping 17 firma khusus muslim dari 17 institusi ternama di UK seperti Barclays, RBS dan Lloyds Banking Group. Aset sebesar £12 milyar yang dimiliki oleh institusi-institusi syariah diatas bahkan dikabarkan mengungguli aset-aset serupa yang dimiliki oleh beberapa Negara Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Turki dan Mesir.

¹ First Islamic Bank to Open in UK <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3547374.stm> diakses 3 Desember 2015



Gambar 1 Peta United Kingdom

Sumber : worldatlas.com

Terlepas dari fakta tersebut, kebijakan untuk mengizinkan operasional IBB di United Kingdom sendiri merupakan suatu peristiwa yang menarik dan kontroversial karena selain merepresentasikan sistem ekonomi Islam, sistem tersebut juga bertentangan dengan sistem ekonomi liberal-kapitalis yang dianut oleh United Kingdom.

Secara prinsip, hal paling fundamental yang menjadi pertentangan antara dua sistem ekonomi tersebut adalah masalah otoritas dan peraturan terkait hal-hal yang *legitimate* di dalamnya. Dalam masalah otoritas, Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam menjadikan Tuhan (Allah) dengan Hukum Syariah yang diciptakanNya sebagai otoritas tertinggi dan tidak mengakui otoritas yang lain.

Disisi lain, Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis menjadikan mekanisme pasar sebagai otoritas tertinggi. Terkait dengan itu, United Kingdom dengan *Bank of England* sebagai salah satu bank tertua didunia tentu mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan sistem ekonomi liberal-kapitalis. Banyak pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BOE seperti tujuan-tujuan kebijakan moneter, agregat moneter, nilai tukar, suku bunga dan inflasi menjadi dasar bagi berbagai macam kebijakan oleh Bank – Bank Sentral di Negara-Negara lain.²

Fakta itu, bagi penganut Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis dianggap buruk, karena dengan begitu Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam tidak akan mengakui legitimasi hukum dan peraturan pemerintah. Hal tersebut menakutkan sebab dapat membuat Institusi – Institusi Keuangan Islam sulit dikontrol.³

Kedua sistem ekonomi tersebut juga bertentangan dalam apa yang dapat dianggap baik ataupun buruk didalam sistem. Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam menganggap bahwa bunga atau *interest* (Eng.) adalah *Haram* dan tidak diperbolehkan, sama seperti tidak diperbolehkannya investasi terhadap makanan dan minuman *Haram* (Babi, alcohol, dll) serta industri pornografi. Hal tersebut jelas – jelas sangat bertentangan dengan Sistem Ekonomi Liberal – Kapitalis yang mana justru menerapkan mekanisme bunga sebagai asas

² Fabozzi, Frank J., Modigliani, Franco, Ferri, Michael G. (1999) *Foundation of Financial Markets and Institutions*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

³<http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1141087/Britains-world-leader-sharia-banking--havent-grasped-sinister-dangerous-implications.html>

fundamental dalam praktek keuangannya dan memperbolehkan investasi terhadap makanan dan minuman *Haram* maupun industri pornografi.

Beroperasionalnya Perbankan Islam sebagai ikon sistem ekonomi dan keuangan Islam di United Kingdom tidak muncul dengan serta merta, akan tetapi muncul melalui serangkaian fenomena dan berlapis-lapis prosedur pertimbangan dalam sistem pengambilan keputusan yang unik dibandingkan dengan sejarah munculnya Perbankan Islam di Asia maupun Timur Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta – fakta diatas, Maka dari itu, penulis mengemukakan permasalahan : *Mengapa United Kingdom dalam Pemerintahan Tony Blair mengizinkan operasional Islamic Banking?*

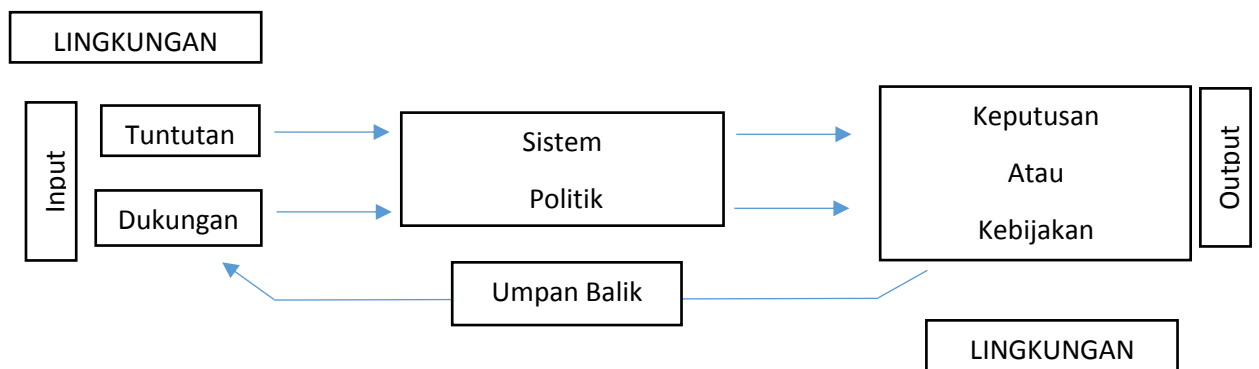
C. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan ini dan menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan mencoba untuk memilah dan menjelaskan fakta – fakta dan data - data yang dianggap dapat menjadi alasan rezim Tony Blair untuk mengizinkan operasional *Islamic Finance* di United Kingdom melalui Model Pengambilan Keputusan David Easton.

Menurut Easton, Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian fungsi Sistem Politik. Sistem Politik menurut Easton adalah bagian dari sistem sosial yang mengalokasikan

nilai-nilai (berbentuk keputusan maupun kebijaksanaan) yang bersifat otoritatif lagi mengikat bagi seluruh masyarakat.⁴

David Easton menggambarkan rangkaian fungsi sistem politik dalam pembuatan keputusan dalam sebuah model berikut ini



Gambar 2 Model Pengambilan Keputusan David Easton

Pada dasarnya, Keputusan atau kebijakan suatu Negara adalah *output* yang dihasilkan dari *input* tertentu yang diolah oleh sistem politik. Tanpa *input*, sistem tidak akan berfungsi dan *output* tidak dapat diperoleh, begitu pun sebaliknya. Dalam perilaku sistem politik, *output* dapat menghasilkan konsekuensi – konsekuensi tertentu yang dapat menjadi *input*. Dalam kasus ini, *input* dapat berarti tanggapan sistem terhadap lingkungan sekitar tempat sistem tersebut bekerja. *Input* dalam model diatas dibagi menjadi 2, tuntutan dan

⁴ Mas' oed, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal xiii

dukungan. *Input – input* inilah yang menjadi bahan mentah atau informasi yang diolah oleh sistem, juga energi yang dibutuhkan oleh sistem tersebut.⁵

Pertama, tuntutan adalah alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam masyarakat yang mana tidak semua kepentingannya dapat terpenuhi secara memuaskan. Bila tuntutan – tuntutan tersebut disalurkan lewat suatu usaha yang terorganisir secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan – tuntutan tersebut dengan sendirinya telah menjadi input – input bagi sistem politik.⁶

Berdasarkan asalnya, tuntutan dapat dibagi menjadi 2 *eksternal* dan *internal*. Tuntutan *eksternal* adalah tuntutan yang berasal dari lingkungan di sekitar sistem tersebut. Lingkungan tempat sistem tersebut berada dapat menjadi bermacam – macam dan dapat dipilah satu sama lainnya seperti ekonomi, kebudayaan, struktur sosial maupun demografi. Kebudayaan misalnya, mempunyai penekanan yang berbeda – beda antara budaya satu dengan budaya lainnya. Beberapa budaya mungkin sangat menekankan segi kebutuhan ekonomis, keberhasilan ekonomi dan efisiensi rasional, namun beberapa budaya yang lain mungkin menekankan pemeliharaan rohani meskipun artinya menjadi kurang efisien dan rasional.⁷ Penekanan – penekanan seperti itu dapat secara efisien memilah poin – poin khusus dibanding poin – poin yang kurang penting yang akan dimasukkan ke dalam sistem politik.

⁵ Ibid. hal 9

⁶ Ibid

⁷ Ibid. hal 10

Di sisi lain, tuntutan *internal* adalah tuntutan yang berasal dari situasi – situasi yang terjadi dalam suatu sistem politik. Tuntutan dapat timbul untuk mengubah hubungan politis antara anggota sistem politik sebagai hasil dari kekecewaan ataupun ketidakpuasan terhadap hubungan itu sendiri. Misalnya adalah timbulnya tuntutan untuk menyeimbangkan perwakilan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan merupakan akibat dari norma perwakilan setara dalam suatu sistem politik belum tereksekusi secara optimal.⁸

Kedua, yaitu *input* berupa dukungan. Jika tuntutan adalah bahan mentah bagi sistem politik untuk diolah menjadi produk akhir (*output*), maka dukungan adalah energi bagi sistem politik untuk mengolah bahan mentah menjadi *output*. Dalam prakteknya, dukungan dapat berupa tindakan atau pandangan yang memajukan (mendukung) dan menghambat (menyatakan penolakan) sistem politik. Berdasarkan sasarannya, dukungan dibagi menjadi 3 : dukungan terhadap komunitas, rejim, dan pemerintah.⁹

Dukungan terhadap komunitas (politik) dapat berarti dukungan yang diarahkan oleh anggota sistem politik terhadap eksistensi kelompok – kelompok yang berusaha menyelesaikan masalah – masalahnya dan mendorong pembuatan keputusan – keputusan lewat tindakan bersama dengan damai. Dukungan terhadap rejim bisa diartikan sebagai dukungan yang diperuntukkan bagi rejim atau “aturan – aturan permainan” yang digunakan oleh sebagian besar anggota sistem tersebut sebagai ukuran untuk menilai sah atau tidaknya

⁸ Ibid. hal 11

⁹ Ibid. hal 15

tindakan – tindakan anggota sistem. Dukungan terhadap pemerintah adalah dukungan oleh anggota – anggota sistem bagi suatu pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas menyelesaikan konflik dalam sistem politik yang mereka anut.¹⁰

D. Implementasi Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan, penulis akan mencoba mengimplementasikan teori yang telah diambil dengan urutan sebagai berikut :

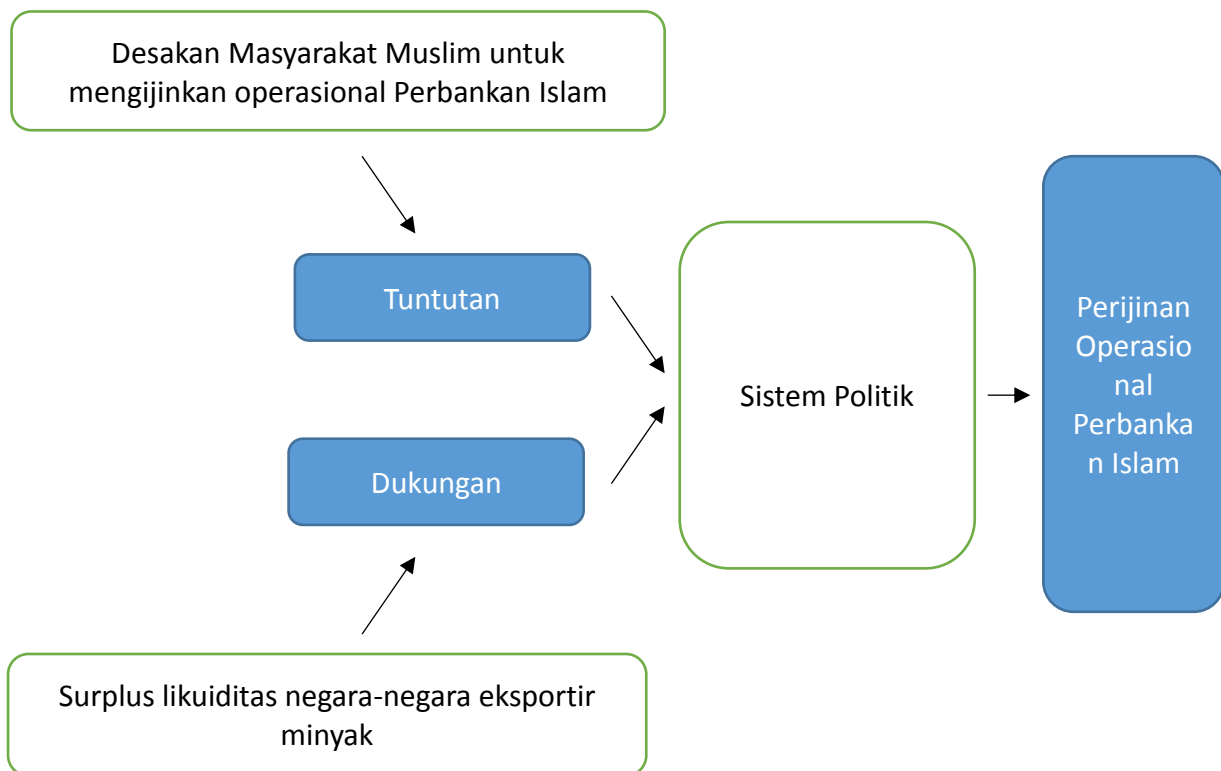
Berdasarkan model pengambilan keputusan oleh David Easton, penulis akan mencoba mengurai pembahasan menjadi beberapa bab sesuai dengan klasifikasi jenis tuntutan dan dukungan yang muncul dan digunakan sebagai *input* dari sistem politik terkait yang telah dibahas sebelumnya :

1. Pertama, pembahasan tuntutan – tuntutan yang berasal dari anggota sistem politik itu sendiri seperti keadaan pemerintahan atau rezim yang berkuasa dan keadaan masyarakat beserta implikasinya terhadap sistem politik sehingga memunculkan urgensi untuk menjadikannya sebagai *input* bagi diizinkannya operasional Perbankan Islam di United Kingdom.
2. Kedua, Setelah mendapatkan hasil dari faktor pertama, penulis akan membahas dukungan yang berasal dari internal atau eksternal sistem politik tersebut seperti pengaruh negara – negara asing dan tren

¹⁰ Ibid hal 16

internasional yang berlaku saat itu beserta implikasinya terhadap sistem politik sehingga membuatnya menjadi *input* bagi diizinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom.

3. Ketiga, setelah mendapatkan kemungkinan potensial dari seluruh determinan, penulis akan menerangkan garis-garis yang menghubungkan seluruh jenis *input* tersebut sehingga dapat mempengaruhi proses keluarnya kebijakan untuk mengizinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom.



Gambar 3 Skema pengaruh tuntutan dan dukungan dalam keluarnya kebijakan perijinan operasional Perbankan Islam

E. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka dengan berlandaskan pada implementasi teori diatas dapat diperoleh hipotesa sebagai berikut :

United Kingdom (UK) mengizinkan berkembangnya Islamic Finance karena pengaruh kuat dari :

1. Tuntutan dari Masyarakat Muslim, untuk mendirikan Perbankan Islam di United Kingdom demi menanggulangi *financial exclusion* yang tengah melanda sebagian masyarakat United Kingdom.
2. Dukungan berupa keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dengan menangkap surplus likuiditas dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara eksportir minyak.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan di UK.
2. Untuk mengidentifikasi kepentingan UK terhadap *Islamic Finance*.
3. Untuk membuktikan bahwa keputusan UK mengizinkan perkembangan Perbankan Islam adalah keputusan yang rasional.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber dari data sekunder. Data – data tersebut diperoleh penulis melalui studi pustaka dari buku referensi, jurnal – jurnal, laporan, artikel, surat

kabar, maupun sumber dari internet. Penggunaan data – data tersebut diharapkan dapat membantu penulis menyelesaikan penelitiannya dengan efektif

H. Jangkauan Penelitian

Demi keefektifan penelitian, penulis memfokuskan penelitian terhadap alasan United Kingdom mengizinkan operasional Perbankan Islam dengan memanfaatkan data-data yang terdokumentasi mulai tahun 1990 hingga 2010. Tahun-tahun tersebut meliputi sebagian akhir masa pemerintahan Thatcher, masa pemerintahan Tony Blair dimana Perbankan Islam pertama berdiri, dan sedikit setelah masa pemerintahan Blair berakhir pada tahun 2007 hingga 2010.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 5 bab, dengan rincin sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Implikasi Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan membahas ekonomi di UK secara umum, gejolak yang muncul dalam perkembangannya dan bagaimana gejolak tersebut dapat menjadi celah bagi kemunculan Perbankan Islam di UK.

Bab III akan membahas tentang perkembangan Perbankan Islam dari awal kemunculannya dan penyebarannya di Dunia Islam hingga kemunculan dan penyebarannya di United Kingdom.

Bab IV membahas jenis – jenis tuntutan dan dukungan yang mendorong sistem politik yang berlaku saat itu untuk mengijinkan operasional Perbankan Islam.

Bab V adalah kesimpulan yang akan ditarik oleh penulis dari hasil pembahasan tiap – tiap bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.